

Kontribusi Dakwah Ulama dalam Membentuk Wacana Politik Kontemporer di Indonesia

Pardianto¹

pardianto@uinsa.ac.id

Abstract: Da'wah plays a strategic role in shaping public opinion, guiding the political preferences of the faithful, and framing national issues from an Islamic perspective. This study examines the contribution of Islamic preachers to contemporary political discourse in Indonesia. It employs a qualitative methodology, utilizing a literature review and discourse analysis to explore how da'wah narratives are produced, disseminated, and received in the context of modern politics. The findings indicate that the preaching of religious scholars contributes to both socio-political polarization and integration, serving as a tool for fostering political awareness, legitimizing power, and facilitating social mobilization. The development of digital media expands the reach of such preaching, thereby strengthening the role of religious scholars in shaping public political discourse in Indonesia. Overall, the preaching of religious scholars plays a significant role in shaping the contours of contemporary political discourse in Indonesia.

Keywords: Transformation of da'wah, ulama, political discourse.

Abstrak: Dakwah memainkan peran strategis dalam membentuk opini publik, khususnya terkait preferensi politik umat Islam dan pembedaan isu-isu nasional dari perspektif Islam. Studi ini membahas kontribusi para pendakwah Islam terhadap wacana politik kontemporer di Indonesia. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan memanfaatkan tinjauan pustaka dan analisis wacana untuk mengeksplorasi bagaimana narasi dakwah diproduksi, disebarluaskan, dan diterima dalam konteks politik modern. Temuan menunjukkan bahwa dakwah para ulama berkontribusi pada polarisasi dan integrasi sosial-politik, berfungsi sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran politik, melegitimasi kekuasaan, dan memfasilitasi mobilisasi sosial. Perkembangan media digital memperluas jangkauan dakwah tersebut, sehingga memperkuat peran ulama dalam membentuk wacana politik publik di Indonesia. Secara keseluruhan, dakwah para ulama memainkan peran penting dalam membentuk kontur wacana politik kontemporer di Indonesia.

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki dinamika hubungan antara agama dan politik yang kompleks. Dalam konteks ini, ulama memainkan peran penting sebagai figur otoritatif dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Dakwah sebagai medium utama ulama menjadi sarana strategis dalam menyampaikan nilai-nilai Islam sekaligus membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu-isu sosial dan politik.

Dinamika hubungan antara dakwah ulama dan politik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks dalam konteks kontemporer. Ulama tidak hanya berperan sebagai aktor religius, tetapi juga sebagai agen sosial yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik dan arah wacana politik. Dalam perspektif Islam, agama dan politik merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan secara tegas, karena keduanya saling berkelindan dalam membangun tatanan sosial yang berlandaskan nilai moral dan etika keagamaan, (Darmawan, 2018: 135).

Perkembangan politik kontemporer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran aktor-aktor keagamaan, khususnya ulama, yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik. Dalam konteks masyarakat yang religius, dakwah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran ajaran agama, tetapi juga sebagai medium konstruksi sosial dan politik. Melalui ceramah, pengajian, media sosial, hingga institusi pendidikan, ulama berkontribusi dalam membentuk wacana politik yang hidup dan dinamis di tengah masyarakat Indonesia yang plural.

Dakwah ulama mengalami transformasi seiring dengan perubahan zaman. Jika pada masa awal kemerdekaan dakwah lebih berfokus pada penguatan identitas keislaman dan nasionalisme, maka pada era reformasi dan pascareformasi, dakwah mulai berurusan secara lebih eksplisit dengan isu-isu politik praktis. Hal ini terlihat dari meningkatnya keterlibatan ulama dalam diskursus publik terkait demokrasi, keadilan sosial, kepemimpinan, serta hubungan antara agama dan negara. Dakwah tidak lagi bersifat normatif semata, tetapi

juga menjadi instrumen artikulasi kepentingan politik tertentu. (Azra, 2000: 45).

Selain itu, kemajuan teknologi informasi turut memperluas jangkauan dakwah ulama. Platform digital memungkinkan pesan-pesan keagamaan dengan muatan politik tersebar secara cepat dan luas, bahkan melampaui batas geografis dan demografis. Fenomena ini memperkuat posisi ulama sebagai opinion leader yang mampu memengaruhi preferensi politik masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam situasi ini, dakwah menjadi arena kontestasi wacana, di mana berbagai narasi politik diproduksi, disebar, dan diperdebatkan. (Hasan, 2009: 229).

Namun demikian, kontribusi dakwah ulama dalam politik kontemporer tidak bersifat monolitik. Terdapat keragaman pendekatan dan orientasi di kalangan ulama, mulai dari yang bersifat moderat hingga konservatif. Sebagian ulama mendorong nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan pluralisme, sementara yang lain cenderung mengusung agenda politik identitas yang eksklusif. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama dan politik di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa dakwah merupakan ruang yang terbuka bagi berbagai interpretasi dan kepentingan. (Hefner, 2000: 112).

Lebih jauh, peran ulama dalam membentuk wacana politik juga tidak terlepas dari relasi mereka dengan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, ulama berperan sebagai mitra kritis pemerintah, sementara dalam kasus lain, mereka justru menjadi bagian dari struktur kekuasaan itu sendiri. Relasi yang dinamis ini memengaruhi arah dan substansi dakwah yang disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dakwah ulama tidak hanya sebagai aktivitas keagamaan, tetapi juga sebagai praktik sosial-politik yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan perkembangan demokrasi dan kemajuan teknologi informasi, praktik dakwah mengalami transformasi, baik dari segi metode, media, maupun substansi pesan. Dakwah tidak lagi terbatas pada ruang-ruang tradisional, melainkan telah merambah ke ruang publik digital yang lebih luas. Dalam konteks ini, ulama memanfaatkan retorika keagamaan sebagai instrumen untuk

membangkai isu-isu politik dan memengaruhi persepsi masyarakat, (Harahap & Manurung, 2024: 72-73). Hal ini menunjukkan bahwa dakwah memiliki kontribusi strategis dalam konstruksi wacana politik, terutama dalam isu-isu seperti identitas, legitimasi kekuasaan, dan moralitas publik.

Selain itu, keterlibatan ulama dalam politik juga memiliki akar historis yang panjang di Indonesia, terutama melalui peran kiai dalam organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama. Peran tersebut terus beradaptasi dengan perubahan sosial-politik, sehingga ulama tetap eksis dalam memengaruhi arah kebijakan dan dinamika politik nasional, (Azharhany et al., 2022: 158). Namun demikian, keterlibatan ini juga memunculkan tantangan, seperti potensi politisasi agama dan munculnya politik identitas yang dapat memicu polarisasi sosial, (Sulfa, 2020: 45).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kontribusi dakwah ulama dalam membentuk wacana politik kontemporer di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran strategis ulama dalam ruang publik, sekaligus mengidentifikasi implikasi sosial-politik dari praktik dakwah tersebut di era modern.

Konsep Dasar Dakwah Ulama

Dakwah ulama merupakan aktivitas penyampaian ajaran Islam yang dilakukan oleh individu yang memiliki otoritas keilmuan agama, dengan tujuan membimbing masyarakat menuju pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam secara komprehensif. Secara konseptual, dakwah tidak hanya dimaknai sebagai ceramah atau tabligh, tetapi juga mencakup proses transformasi sosial yang berorientasi pada perbaikan moral, spiritual, dan sosial umat, (Kersten, 2015: 112–114). Dalam konteks ini, ulama berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang mengintegrasikan ajaran normatif Islam dengan realitas empiris masyarakat.

Dakwah ulama juga dapat dimaknai sebagai penyampaian ajaran Islam yang dilakukan oleh individu yang memiliki otoritas keilmuan agama, dengan tujuan membimbing masyarakat menuju pemahaman

dan pengamalan nilai-nilai Islam secara komprehensif. Secara konseptual, dakwah tidak hanya dimaknai sebagai ceramah atau tabligh, tetapi juga mencakup proses transformasi sosial yang berorientasi pada perbaikan moral, spiritual, dan sosial umat, (Kersten, 2015:112–114). Dalam hal ini, ulama berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang mengintegrasikan ajaran normatif Islam dengan realitas empiris masyarakat.

Dalam literatur klasik, konsep dakwah dijelaskan secara sistematis oleh Yusuf al-Qaradawi yang menekankan bahwa dakwah adalah usaha mengajak manusia kepada kebaikan (*al-khair*), *amar ma'ruf nahi munkar*, serta membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam, (Al-Qaradawi, 1992: 25–27). Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah ulama memiliki dimensi normatif sekaligus praksis dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif komunikasi modern, dakwah ulama melibatkan proses penyampaian pesan, penggunaan media, serta interaksi dengan audiens (*mad'u*). Seiring perkembangan teknologi, metode dakwah mengalami transformasi signifikan, terutama melalui media digital yang memperluas jangkauan pengaruh ulama dalam ruang publik (Campbell & Tsuria, 2021: 89–91). Hal ini menjadikan dakwah lebih adaptif, dialogis, dan responsif terhadap isu-isu kontemporer.

Selain itu, dakwah ulama juga memiliki dimensi kultural, di mana ulama berperan dalam menafsirkan ajaran Islam sesuai dengan konteks lokal. Sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab, dakwah yang efektif harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara bijaksana, (Shihab, 2002: 134–136). Dengan demikian, dakwah tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, yang menafsirkan nilai-nilai Islam sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal. Hal ini terlihat dalam praktik Islam di Indonesia yang cenderung moderat dan adaptif terhadap keragaman, (Hefner, 2011: 56–58). Dengan demikian, dakwah ulama berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara ortodoksi ajaran dan kebutuhan sosial masyarakat.

Namun, dalam konteks kontemporer, dakwah ulama menghadapi tantangan seperti komodifikasi agama, fragmentasi otoritas, dan beragamnya interpretasi keagamaan di ruang digital. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif terhadap konsep dasar dakwah ulama menjadi penting untuk menilai peran strategisnya dalam membentuk kesadaran religius dan dinamika sosial masyarakat modern.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) merupakan pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan sumber tertulis lainnya. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan mengandalkan kekuatan analisis konseptual dan interpretatif terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. (Mestika Zed, 2014: 3).

Tujuan utama dari studi kepustakaan adalah untuk memahami, mengkaji, serta mengkritisi berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang suatu masalah. Dalam konteks penelitian kualitatif, pendekatan ini menekankan pada kedalaman analisis, bukan pada kuantifikasi data. Oleh karena itu, peneliti dituntut untuk mampu melakukan interpretasi secara sistematis dan logis terhadap sumber-sumber yang digunakan. (Moleong, 2018: 6).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana (*discourse analysis*) untuk memahami bagaimana pesan dakwah ulama membentuk narasi politik di ruang publik. Analisis ini difokuskan pada isi pesan dakwah, konteks sosial politik, serta medium penyampaiannya. Teknik analisis data menggunakan analisis wacana (*discourse analysis*) merupakan metode kualitatif yang digunakan untuk

Metodologi

memahami makna di balik bahasa, teks, maupun praktik komunikasi dalam konteks sosial tertentu. Analisis ini tidak hanya menelaah struktur bahasa, tetapi juga mempertimbangkan relasi kekuasaan, ideologi, dan konteks budaya yang memengaruhi produksi dan interpretasi wacana. (Fairclough, 1995: 73).

Dalam penerapannya, peneliti mengidentifikasi tema, pola, serta strategi bahasa yang digunakan dalam teks, kemudian mengaitkannya dengan realitas sosial yang lebih luas. (Van Dijk, 2008: 85). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang bersifat kompleks dan kontekstual.

Hasil dan Pembahasan

Kontribusi Dakwah Ulama dalam Membentuk Wacana Politik Kontemporer

Polarisasi dan Integrasi Sosial-Politik Dakwah Ulama

Polarisasi dan integrasi sosial-politik dalam dakwah ulama merupakan dua dinamika yang saling berkelindan dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. Polarisasi muncul ketika dakwah digunakan sebagai instrumen politik identitas yang menegaskan perbedaan “kita” dan “mereka”, sehingga memicu fragmentasi sosial. Dakwah dapat dimanfaatkan untuk mobilisasi politik berbasis agama yang memperkuat eksklusivisme dan memicu konflik horizontal, (Sukirno 2023, 45-47). Selain itu, perbedaan penafsiran keagamaan dan kepentingan kekuasaan juga melahirkan kelompok-kelompok sosial yang solid tetapi sulit terintegrasi secara politik, (Putra, 2016: 112). Harahap dan Manurung (2023: 88–90) menambahkan bahwa retorika dakwah yang sarat muatan ideologis melalui bahasa emosional dan simbolik semakin memperkuat pembelahan opini publik.

Namun demikian, dakwah ulama tidak selalu berujung pada polarisasi. Dalam perspektif integrasi sosial-politik, ulama juga berperan sebagai mediator yang mampu membangun kohesi sosial. Konsep *ummah*, sebagaimana tercermin dalam

Piagam Madinah, menjadi landasan integrasi masyarakat plural melalui nilai keadilan, kesetaraan, dan toleransi, (Najah dan Wijayanto, 2024: 423-425). Ulama sebagai aktor sosial memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kepentingan agama dan negara serta mendorong terciptanya harmoni sosial. Bahkan, dakwah moderat dalam konteks politik modern terbukti mampu meredam konflik dan memperkuat solidaritas lintas kelompok, (Thadi dan Damayanti, 2020: 56–58).

Polarisasi sosial-politik dalam dakwah ulama semakin kompleks di era digital dan globalisasi. Polarisasi tidak hanya diproduksi oleh perbedaan ideologi, tetapi juga oleh struktur komunikasi modern seperti media sosial yang menciptakan *echo chamber*. Penelitian oleh Faizin et al. (2024) menunjukkan bahwa isu keagamaan di ruang digital sering memicu konflik karena terbentuknya kelompok pro dan kontra yang terisolasi secara opini, sehingga memperkuat fragmentasi sosial. Fenomena ini sejalan dengan temuan dalam kajian komunikasi politik yang menyatakan bahwa polarisasi muncul ketika interaksi antar kelompok melemah dan digantikan oleh solidaritas internal yang kuat namun eksklusif.

Dalam konteks dakwah, kondisi ini diperparah oleh munculnya populisme agama. Dakwah berbasis populisme cenderung menggunakan narasi emosional dan simplifikasi isu untuk menarik dukungan massa. Akibatnya, dakwah tidak lagi sekadar sarana transformasi spiritual, tetapi juga menjadi alat mobilisasi politik yang berpotensi memperdalam polarisasi, (Ansoriah dan Khotimah, 2023: 67-69). Bahkan, Sulfa (2020) menegaskan bahwa otoritas ulama dalam mengeluarkan fatwa dapat membentuk opini publik secara luas, namun juga berisiko menciptakan segregasi sosial apabila digunakan dalam kerangka politik identitas.

Di sisi lain, integrasi sosial-politik tetap dapat dibangun melalui dakwah yang adaptif dan moderat. Integrasi dapat tercapai melalui penguatan solidaritas objektif, dialog lintas kelompok, dan peran ulama sebagai mediator konflik, (Undang dan Thamrin, 2017: 215-217). Dakwah yang menekankan nilai *wasathiyah* (moderasi) mampu mengurangi ketegangan dan membangun konsensus sosial. Selain itu, pendekatan dakwah yang kontekstual dengan memanfaatkan teknologi

secara inklusif dapat memperluas ruang dialog dan memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Dengan demikian, polarisasi dan integrasi dalam dakwah ulama sangat bergantung pada orientasi, metode, dan kepentingan yang melatarbelakanginya. Dakwah yang eksklusif cenderung memperdalam konflik sosial-politik, sedangkan dakwah yang inklusif berpotensi menjadi kekuatan integratif bagi masyarakat. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa posisi dakwah ulama berada pada titik krusial: antara menjadi faktor polarisasi atau instrumen integrasi. Arah tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana ulama mengelola otoritas keagamaan, media komunikasi, serta orientasi dakwah dalam merespons dinamika sosial-politik kontemporer.

Ulama sebagai Aktor Sosial dan Politik

Ulama memiliki posisi penting dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Dalam sejarah Indonesia, ulama telah terlibat dalam berbagai gerakan politik, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi. Peran ini menunjukkan bahwa ulama memiliki legitimasi moral yang kuat di mata masyarakat. Oleh karena itu, dakwah yang disampaikan oleh ulama sering kali memiliki pengaruh terhadap opini publik, termasuk dalam isu-isu politik.

Posisi strategis ulama ini adalah sebagai aktor sosial dan politik dalam masyarakat Indonesia. Peran ini tidak hanya terbatas pada fungsi keagamaan sebagai penyampai ajaran Islam, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam proses sosial dan dinamika kekuasaan. Dalam konteks sosial, ulama berfungsi sebagai mediator nilai yang menghubungkan ajaran agama dengan realitas kehidupan masyarakat, sehingga mereka memiliki otoritas moral yang kuat dalam membentuk norma, etika, dan perilaku publik (Fealy, 2007: 45–47).

Ulama sebagai aktor sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat Muslim, juga sebagai penjaga otoritas keagamaan. Peran ini berkembang seiring dengan dinamika sejarah dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dalam konteks ini, ulama tidak

sekadar berfungsi sebagai penyampai ajaran agama, melainkan juga sebagai mediator sosial, penggerak perubahan, serta bahkan pengambil peran dalam kekuasaan politik. Namun demikian, peran ganda ini juga menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan potensi politisasi agama dan fragmentasi sosial akibat perbedaan interpretasi keagamaan. Oleh karena itu, posisi ulama sebagai aktor sosial dan politik perlu dipahami secara kritis agar dapat berkontribusi secara konstruktif dalam menjaga stabilitas sosial dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Secara sosial, ulama sering menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Legitimasi moral yang dimiliki ulama berasal dari pengetahuan agama serta integritas pribadi yang diakui oleh komunitasnya. Hal ini menjadikan mereka memiliki pengaruh kuat dalam membentuk norma, nilai, dan perilaku sosial. Dalam banyak kasus, ulama berperan sebagai penengah konflik, pemberi nasihat, serta pelindung kepentingan masyarakat kecil. (Azra, 2004: 15).

Selain itu, ulama juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial. Mereka kerap terlibat dalam gerakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui institusi seperti pesantren, majelis taklim, dan organisasi keagamaan, ulama turut membentuk kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan etika sosial. Dengan demikian, peran sosial ulama tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformasional. (Bruinessen, 1995: 23).

Dalam ranah politik, keterlibatan ulama memiliki sejarah panjang. Sejak masa klasik hingga modern, ulama sering menjadi bagian dari struktur kekuasaan atau setidaknya memiliki pengaruh terhadap penguasa. Dalam beberapa kasus, ulama berfungsi sebagai penasihat raja atau pemerintah, sementara dalam konteks lain mereka menjadi oposisi yang kritis terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. (Lapidus, 2014:102).

Ulama juga sering kali terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui dukungan terhadap aktor politik tertentu maupun melalui penyampaian wacana keagamaan yang memengaruhi preferensi politik masyarakat. Menurut Robert W. Hefner, keterlibatan ulama dalam politik demokratis

menunjukkan adanya transformasi otoritas keagamaan ke dalam ruang publik modern yang lebih terbuka dan kompetitif, (Hefner, 2011: 12–14). Hal ini memperlihatkan bahwa ulama tidak lagi berada di pinggiran kekuasaan, melainkan menjadi bagian integral dari proses demokratisasi.

Di Indonesia, peran politik ulama tampak jelas sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi. Banyak ulama yang terlibat dalam gerakan nasionalisme dan pembentukan negara. Mereka tidak hanya memberikan legitimasi religius terhadap perjuangan, tetapi juga secara langsung terlibat dalam organisasi politik dan pemerintahan. Hingga kini, peran tersebut masih berlanjut, baik melalui partai politik maupun organisasi masyarakat. (Noer, 1982: 45).

Namun, keterlibatan ulama dalam politik juga menimbulkan tantangan. Salah satunya adalah potensi politisasi agama yang dapat memecah belah masyarakat. Ketika ulama terlalu dekat dengan kekuasaan, independensi moral mereka bisa dipertanyakan. Oleh karena itu, penting bagi ulama untuk menjaga keseimbangan antara peran sebagai pemimpin agama dan aktor politik, agar tetap dapat dipercaya oleh masyarakat luas. (Hefner, 2000: 67).

Ulama sebagai aktor sosial dan politik memiliki peran yang kompleks dan multidimensional. Mereka tidak hanya menjaga ajaran agama, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk tatanan sosial dan politik. Tantangan ke depan adalah bagaimana ulama dapat terus memainkan peran tersebut secara bijak, tanpa kehilangan integritas dan kepercayaan publik.

Dakwah sebagai Instrumen Pembentukan Wacana Politik Kontemporer

Dakwah dalam Islam pada dasarnya merupakan upaya menyampaikan ajaran agama pada masyarakat agar memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam perkembangan sejarah, dakwah tak hanya terbatas pada ranah spiritual dan moral, tapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang signifikan. Dakwah sering menjadi instrumen penting dalam membentuk

wacana politik, terutama di masyarakat Muslim yang menjadikan agama sebagai sumber nilai utama dalam kehidupan publik.

Dakwah tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian ajaran agama, tetapi juga sebagai sarana komunikasi sosial yang mampu membentuk persepsi masyarakat. Melalui dakwah, ulama dapat menyampaikan pandangan mereka tentang keadilan, kepemimpinan, demokrasi, dan isu-isu politik lainnya. Dalam konteks ini, dakwah menjadi instrumen penting dalam membentuk wacana politik. Misalnya, pesan-pesan tentang keadilan sosial dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya, dakwah juga dapat digunakan untuk mendukung stabilitas politik dengan menekankan pentingnya persatuan dan ketertiban.

Sebagai proses komunikasi, dakwah memiliki kekuatan dalam membentuk cara pandang (*worldview*) masyarakat. Melalui khutbah, ceramah, media sosial, maupun institusi pendidikan, pesan-pesan dakwah dapat memengaruhi persepsi umat terhadap isu-isu sosial dan politik. Dalam hal ini, dakwah tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan nilai dan kepentingan tertentu yang dapat mengarahkan opini publik. (Azra, 2000: 34). Oleh karena itu, dakwah sering digunakan untuk membangun legitimasi terhadap suatu gagasan politik atau bahkan kekuasaan tertentu.

Dalam konteks politik, dakwah dapat berfungsi sebagai alat mobilisasi massa. Seorang dai yang memiliki kharisma dan basis pengikut yang luas mampu menggerakkan masyarakat untuk mendukung agenda tertentu, baik dalam bentuk partisipasi politik, aksi sosial, maupun dukungan terhadap kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah memiliki daya pengaruh yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. (Dale F. & Piscatori, 1996: 56).

Di sisi lain, dakwah juga berperan dalam membentuk wacana politik yang berbasis nilai-nilai keagamaan seperti keadilan, amanah, dan kesejahteraan. Melalui narasi keagamaan, dakwah dapat menjadi sarana kritik terhadap praktik politik yang korup atau tidak adil. Dengan demikian, dakwah dapat berfungsi sebagai kekuatan moral

yang mengontrol jalannya kekuasaan dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (Esposito, 1998: 78).

Di Indonesia, peran dakwah dalam pembentukan wacana politik semakin terlihat dengan berkembangnya teknologi informasi. Media sosial menjadi ruang baru bagi para dai untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang sekaligus mengandung muatan politik. Fenomena ini memperluas jangkauan dakwah, tetapi juga menimbulkan tantangan baru, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, polarisasi masyarakat, serta munculnya wacana keagamaan yang eksklusif. (Hasan, 2018: 112).

Selain itu, terdapat risiko bahwa dakwah dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis yang sempit. Ketika dakwah dijadikan alat propaganda, nilai-nilai universal agama dapat tereduksi menjadi sekadar instrumen legitimasi kekuasaan. Hal ini berpotensi merusak esensi dakwah itu sendiri sebagai sarana pencerahan dan pembebasan. (Hefner, 2000: 95). Oleh karena itu, penting bagi para pelaku dakwah untuk menjaga integritas dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran serta keadilan dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan.

Sehingga, dakwah sebagai instrumen pembentukan wacana politik memiliki peran yang sangat strategis. Ia dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan positif, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis dari masyarakat serta tanggung jawab moral dari para dai agar dakwah tetap menjadi sarana yang konstruktif dalam kehidupan sosial dan politik.

Transformasi Dakwah Ulama Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik dakwah Islam. Dakwah yang sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui pertemuan tatap muka, seperti pengajian, khutbah, dan majelis taklim, kini mengalami transformasi ke ruang digital. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi media yang digunakan, tetapi

juga cara penyampaian, audiens, serta dinamika interaksi antara dai dan umat.

Era digital menghadirkan berbagai platform yang memungkinkan dakwah menjangkau audiens yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok menjadi sarana baru bagi para dai untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara lebih kreatif dan interaktif. Melalui format video pendek, podcast, dan siaran langsung, dakwah menjadi lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda, (Hasan, 2018: 134). Hal ini menunjukkan bahwa dakwah tidak lagi bersifat konvensional, melainkan telah beradaptasi dengan kebutuhan zaman.

Transformasi ini memiliki dua implikasi utama. Pertama, jangkauan dakwah menjadi lebih luas dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kedua, terjadi perubahan gaya komunikasi dakwah yang lebih adaptif dan interaktif. Namun, di sisi lain, digitalisasi dakwah juga menghadirkan tantangan, seperti penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dan potensi polarisasi politik. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana dakwah

Selain memperluas jangkauan, transformasi digital juga mengubah karakter audiens dakwah. Masyarakat kini tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam diskusi, memberikan komentar, bahkan menyebarkan kembali konten dakwah. Interaksi dua arah ini menciptakan ruang dialog yang lebih dinamis, tetapi juga menuntut para dai untuk lebih responsif dan terbuka terhadap berbagai pandangan, (Eickelman & Anderson, 2003: 67).

Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Salah satunya adalah maraknya informasi keagamaan yang tidak terverifikasi atau bahkan menyesatkan. Siapa pun dapat menjadi “pendakwah” di ruang digital tanpa memiliki otoritas keilmuan yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat serta memperkuat penyebaran paham keagamaan yang ekstrem atau intoleran, (Bunt, 2009: 89). Oleh karena itu, literasi digital dan keagamaan menjadi sangat penting dalam menghadapi fenomena ini.

Di sisi lain, dakwah digital juga menghadapi tantangan dalam menjaga kedalaman substansi. Format konten yang cenderung singkat dan cepat sering kali membuat pesan dakwah menjadi dangkal dan kurang komprehensif. Para dai dituntut untuk mampu menyederhanakan pesan tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam. Kreativitas dalam mengemas konten menjadi kunci agar dakwah tetap menarik sekaligus bermakna, (Azra, 2002: 56).

Transformasi dakwah di era digital juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas. Para dai dapat bekerja sama dengan kreator konten, akademisi, maupun lembaga keagamaan untuk menghasilkan materi dakwah yang berkualitas. Selain itu, teknologi juga memungkinkan penggunaan data dan analitik untuk memahami kebutuhan audiens secara lebih tepat, sehingga pesan dakwah dapat disampaikan secara lebih efektif, (Campbell, 2013: 102). Dengan demikian, transformasi dakwah di era digital merupakan fenomena yang tidak terelakkan. Perubahan ini membawa peluang besar sekaligus tantangan yang kompleks. Keberhasilan dakwah di era ini sangat bergantung pada kemampuan para dai untuk beradaptasi dengan teknologi, menjaga integritas keilmuan, serta tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif.

Dakwah Ulama dan Mobilisasi Politik

Dakwah ulama memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya sebagai sarana penyampaian ajaran agama, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang mampu memengaruhi dinamika politik. Dalam banyak konteks, dakwah tidak berdiri sendiri sebagai aktivitas spiritual, melainkan menjadi medium strategis dalam mobilisasi politik, baik untuk mendukung kekuasaan maupun sebagai alat kritik terhadapnya.

Ulama sebagai aktor dakwah memiliki legitimasi moral dan otoritas keagamaan yang kuat di mata masyarakat. Kepercayaan ini menjadikan mereka figur yang berpengaruh dalam membentuk opini publik. Melalui ceramah, khutbah, dan berbagai aktivitas keagamaan lainnya, ulama dapat menyampaikan pesan-pesan yang tidak hanya bersifat religius, tetapi juga politis. Dalam situasi tertentu, pesan

dakwah dapat diarahkan untuk membangun kesadaran politik umat dan mendorong partisipasi dalam proses politik, (Azra, 2000: 41)

Mobilisasi politik melalui dakwah sering kali terjadi ketika isu-isu keagamaan dikaitkan dengan kepentingan politik. Misalnya, dalam konteks pemilihan umum, ulama dapat mengajak umat untuk memilih pemimpin yang dianggap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ajakan ini, meskipun disampaikan dalam kerangka dakwah, memiliki implikasi politik yang nyata karena mampu memengaruhi pilihan politik masyarakat, (Eickelman & Piscatori, 1996: 89). Mobilisasi ini menunjukkan bahwa dakwah memiliki kekuatan sebagai alat konsolidasi sosial. Namun, hal ini juga menimbulkan perdebatan tentang batas antara dakwah dan politik praktis, sehingga dakwah bisa menjadi alat dalam menggerakkan massa.

Selain itu, dakwah juga dapat berfungsi sebagai sarana resistensi terhadap kekuasaan yang dianggap tidak adil. Dalam sejarah Islam, banyak ulama yang menggunakan dakwah untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan memperjuangkan keadilan sosial. Peran ini menunjukkan bahwa dakwah tidak selalu identik dengan dukungan terhadap kekuasaan, tetapi juga dapat menjadi alat perjuangan bagi kelompok yang tertindas, (Esposito, 1982: 73).

Di Indonesia, mobilisasi politik melalui dakwah memiliki akar sejarah yang panjang. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, ulama memainkan peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Dakwah menjadi medium yang efektif karena mampu menggabungkan aspek emosional, spiritual, dan rasional dalam satu narasi yang kuat, (Noer, 1982: 73). Hal ini menjadikan dakwah sebagai instrumen yang sulit dipisahkan dari dinamika politik di masyarakat Muslim.

Namun demikian, penggunaan dakwah untuk mobilisasi politik juga menimbulkan berbagai persoalan. Salah satu tantangan utama adalah potensi politisasi agama yang dapat memecah belah masyarakat. Ketika dakwah digunakan untuk kepentingan politik praktis, ada risiko bahwa pesan-pesan keagamaan menjadi bias dan kehilangan objektivitas. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap ulama sebagai pemimpin moral, (Hefner, 2000: 121).

Selain itu, mobilisasi politik berbasis dakwah juga dapat memicu polarisasi sosial, terutama jika pesan yang disampaikan bersifat eksklusif atau mengandung unsur provokatif. Oleh karena itu, penting bagi ulama untuk menjaga keseimbangan antara peran dakwah dan keterlibatan politik. Mereka perlu memastikan bahwa dakwah tetap berorientasi pada nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan, persatuan, dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, dakwah ulama sebagai sarana mobilisasi politik merupakan fenomena yang kompleks. Di satu sisi, ia memiliki potensi besar untuk mendorong partisipasi politik dan memperjuangkan keadilan. Di sisi lain, ia juga mengandung risiko yang perlu dikelola dengan bijak. Peran ulama yang profesional, moderat, dan bertanggung jawab menjadi kunci agar dakwah tetap menjadi kekuatan positif dalam kehidupan sosial dan politik.

Tantangan dan Prospek Dakwah Ulama Kontemporer

Di era kontemporer, dakwah ulama menghadapi berbagai tantangan, seperti pluralisme masyarakat, globalisasi, dan perkembangan teknologi. Ulama dituntut untuk mampu menyampaikan dakwah yang relevan dengan konteks zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar agama. Ke depan, dakwah ulama memiliki potensi besar untuk terus berkontribusi dalam membentuk wacana politik yang konstruktif, terutama dalam memperkuat demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.

Kontribusi dakwah ulama merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan umat Islam. Melalui dakwah, ulama menyampaikan ajaran agama, membimbing masyarakat, serta menjaga nilai-nilai moral dan spiritual. Namun, di tengah perubahan sosial, politik, dan teknologi yang semakin cepat, dakwah ulama menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Di sisi lain, perubahan tersebut juga membuka peluang baru yang menjanjikan bagi perkembangan dakwah di masa depan.

Salah satu tantangan utama dakwah ulama adalah perubahan karakter masyarakat yang semakin kritis dan beragam. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membuka akses luas terhadap

berbagai sumber pengetahuan, termasuk pemikiran keagamaan dari berbagai perspektif. Hal ini membuat otoritas ulama tidak lagi bersifat absolut seperti di masa lalu. Masyarakat kini cenderung membandingkan, mengkritik, bahkan mempertanyakan pandangan ulama, (Azra, 2000: 52). Oleh karena itu, ulama dituntut untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan kemampuan komunikasi agar tetap relevan dengan kebutuhan umat.

Selain itu, perkembangan media digital juga menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi, media digital memberikan ruang yang luas bagi dakwah untuk menjangkau audiens yang lebih besar. Namun, di sisi lain, muncul fenomena “ustaz instan” yang tidak memiliki kapasitas keilmuan memadai tetapi memiliki popularitas tinggi di media sosial. Hal ini dapat mengaburkan otoritas keagamaan dan berpotensi menyebarkan pemahaman yang keliru, (Bunt, 2009: 103). Dalam konteks ini, ulama perlu beradaptasi dengan teknologi tanpa mengorbankan kedalaman dan keakuratan ajaran.

Tantangan berikutnya adalah politisasi agama yang dapat memengaruhi independensi dakwah. Dalam situasi tertentu, ulama terlibat dalam dinamika politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan ini sering kali menimbulkan dilema antara menjaga integritas dakwah dan memenuhi kepentingan politik tertentu. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap ulama, (Hefner, 2000: 140).

Meski menghadapi berbagai tantangan, prospek dakwah ulama di masa depan tetap terbuka lebar. Kemajuan teknologi justru dapat dimanfaatkan sebagai sarana inovasi dalam berdakwah. Platform digital memungkinkan ulama untuk menyampaikan pesan secara lebih kreatif, interaktif, dan menjangkau generasi muda. Dengan pendekatan yang tepat, dakwah dapat menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kontemporer, (Campbell, 2013: 121).

Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai spiritual di tengah kehidupan modern juga menjadi peluang besar. Banyak individu yang mencari makna hidup dan ketenangan batin di tengah tekanan kehidupan global. Dalam hal ini, dakwah ulama dapat berperan sebagai solusi dengan menawarkan

ajaran Islam yang moderat, damai, dan relevan dengan kehidupan modern, (Esposito, 1998: 156).

Ke depan, keberhasilan dakwah ulama sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam menjawab tantangan zaman. Ulama tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu agama, tetapi juga memahami konteks sosial, budaya, dan teknologi yang berkembang. Pendekatan dakwah yang adaptif, dialogis, dan berbasis pada nilai-nilai universal Islam menjadi kunci untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan dakwah.

Dengan demikian, tantangan dan prospek dakwah ulama merupakan dua sisi yang saling berkaitan. Tantangan yang ada bukanlah hambatan semata, tetapi juga peluang untuk melakukan inovasi dan pembaruan. Dengan sikap yang bijak dan strategi yang tepat, dakwah ulama dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan umat dan masyarakat luas.

Simpulan

Transformasi dakwah di era digital semakin memperkuat peran ulama dalam ruang publik, meskipun juga menghadirkan tantangan baru. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dakwah yang bijak, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dakwah ulama memiliki kontribusi dalam membentuk wacana politik kontemporer di Indonesia. Melalui dakwah, ulama tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu-isu politik.

Dakwah ulama juga memiliki kontribusi dalam membentuk wacana politik kontemporer di Indonesia. Melalui ceramah, tulisan, maupun keterlibatan langsung dalam ruang publik, ulama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai nilai-nilai keagamaan, tetapi juga sebagai aktor yang memengaruhi arah pemikiran politik masyarakat. Nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang disampaikan dalam dakwah turut menjadi landasan dalam membangun kesadaran politik yang lebih berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Di sisi lain, kontribusi ini juga menunjukkan adanya dinamika antara agama dan politik yang tidak selalu bersifat harmonis,

melainkan memerlukan keseimbangan agar tidak menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peran ulama dalam dakwah politik diharapkan tetap mengedepankan prinsip moderasi, inklusivitas, dan persatuan bangsa, sehingga mampu memperkuat demokrasi tanpa mengabaikan nilai-nilai kebhinekaan yang menjadi ciri khas Indonesia.

Referensi

- Ansoriah, S., & Khotimah, K. (2023). Populisme agama dalam dakwah kontemporer. *Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Dakwah*, 6(1), 60–72. <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/meyarsa> (Ejournal UIN Madura)
- Azharghany, R., Adim, A., & Rusdi, H. R. (2022). Paradigma dakwah Islam kiai dalam kancah politik. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 21(2), 150–165. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah>
- Azra, A. (2000). *Islam substantif: Agar umat tidak jadi buih*. Mizan.
- Azra, A. (2002). *Islam Nusantara: Jaringan global dan lokal*. Mizan.
- Azra, A. (2004). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*. Kencana.
- Bahtiar, E. (1998). *Islam dan negara*. Paramadina.
- Bunt, G. R. (2009). *iMuslims: Rewiring the house of Islam*. University of North Carolina Press.
- Campbell, H. A. (2013). *Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds*. Routledge.
- Campbell, H. A., & Tsuria, R. (2021). Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds. *New Media & Society*, 23(1), 85–102.
- Darmawan, C. (2018). Eksistensi ulama dalam pergulatan dakwah dan politik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(2), 133–147. <https://doi.org/10.14421/jmd.2018.42-02>

- Eickelman, D. F., & Anderson, J. W. (2003). *New media in the Muslim world: The emerging public sphere*. Indiana University Press.
- Eickelman, D. F., & Piscatori, J. (1996). *Muslim politics*. Princeton University Press.
- Esposito, J. L. (1998). *Islam and politics*. Syracuse University Press.
- Faizin, B., Fitri, S. A., & Maylawati, D. S. (2024). Polarization of religious issues in Indonesia's social media society and its impact on social conflict. *ResearchGate Preprint*, 1–10. <https://www.researchgate.net/>
- Fairclough, N. (1995). *Discourse and social change*. Polity Press.
- Fealy, G. (2007). Nahdlatul Ulama and the politics of Islamic identity in Indonesia. *Journal of Asian Studies*, 66(2), 43–68. <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-asian-studies>
- Harahap, M. Fahri & Marzuki Manurung. (2025). Bahasa Sebagai Alat Dakwah Politik: Studi Kasus Pidato Ulama Dalam Konteks Politik Islam. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3495–3503. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1960>
- Hasan, N. (2009). The making of public Islam: Piety, agency, and commodification on the landscape of the Indonesian public sphere. *Contemporary Islam*, 3(3), 229–250. <https://doi.org/10.1007/s11562-009-0096-9>
- Hasan, N. (2018). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Kersten, C. (2015). Islam in Indonesia: The contest for society, ideas and values. *Journal of Southeast Asian Studies*, 46(1), 110-120.

<https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-southeast-asian-studies>

- Lapidus, I. M. (2014). *A history of Islamic societies*. Cambridge University Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Najah, Faza 'Ainun & Enggar Wijayanto. (2024). Pengaruh Ummah dan Integrasi Sosial Politik dalam Konstruksi Ketatanegaraan Islam Demokratis di Indonesia. *Bulletin of Community Engagement*, 4(1), 421–428. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i1.1289>
- Noer, D. (1982). *Gerakan modern Islam di Indonesia 1900–1942*. LP3ES.
- Putra, O. E. (2016). Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan Sosial Politik di Indonesia. *Jurnal Tarjih*, 13(2), 105–120. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/download/13105/6>
- Qaradawi, Y. (1992). *Fiqh al-da'wah*. Maktabah Wahbah.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan.
- Sukirno. (2023). Dakwah dan politik identitas: Implikasi kehidupan keagamaan dalam dinamika sosial-politik kontemporer. *Jurnal Lentera*, 21(1), 40–50.
- Sulfa, N. (2020). Ulama dalam Penguatan Politik Identitas Perspektif Al-Qur'an. *Revelatia*, 1(2), 40–50. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v1i2.3829>
- Thadi, R., & Damayanti, P. (2021). Ulama Sebagai Aktor Sosial: Peran Strategis Ulama sebagai Komunikator Dakwah. *DAWUH : Islamic Communication Journal*, 2(2), 41-48. Retrieved from <https://www.siducat.org/index.php/dawuh/article/view/271>

- Undang, G., & Thamrin, H. (2017). Konflik dan integrasi Islam politik. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16(2), 210–220. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra>
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and context*. Cambridge University Press.
- Van Bruinessen, M. (1995). *Kitab kuning, pesantren dan tarekat*. Mizan.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.